

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Sektor perbankan merupakan bagian penting dalam sistem keuangan Indonesia yang berperan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui berbagai layanan keuangan seperti penghimpunan dana dan penyaluran kredit, perbankan berkontribusi terhadap kelancaran transaksi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, bank juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat secara efisien dan aman, menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan perekonomian negara (Ryu & Fan, 2023).

Perbankan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat, dengan kegiatan utama berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pemberian jasa perbankan seperti kliring dan inkaso, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 10 Tahun 1998. Sebagai sektor yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, perbankan berada di bawah pengawasan dan regulasi yang ketat. Transparansi serta pengelolaan risiko menjadi aspek utama dalam menjaga keberlanjutan industri perbankan, mengingat tingginya tingkat eksposur terhadap berbagai risiko. Akibatnya, kebijakan pengungkapan manajemen risiko harus sesuai dengan standar regulasi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian terkait yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko dalam sektor perbankan menjadi semakin relevan dalam mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih transparan dan berkelanjutan (Salmita, 2023).

Transparansi dalam pengelolaan risiko merupakan aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam pengungkapan manajemen risiko. Menurut teori keagenan, ketidakseimbangan informasi dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Akibatnya, mekanisme tata kelola yang efektif diperlukan untuk memastikan pengungkapan risiko yang akurat dan dapat diandalkan. Bagi perusahaan yang terdaftar di pasar modal, transparansi dalam pengungkapan risiko menjadi faktor krusial untuk mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan kepercayaan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Teori pengungkapan menyatakan bahwa semakin tinggi transparansi dalam menyampaikan informasi risiko, semakin besar peluang perusahaan memperoleh kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas jangka panjang. Dalam sektor perbankan, tren peningkatan jumlah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi indikator pentingnya tata kelola dan transparansi. Pada tahun 2023, terdapat 47 bank yang telah

mencatatkan sahamnya di BEI, yang tidak hanya memberikan akses pendanaan tambahan tetapi juga memperkuat transparansi perusahaan. Namun, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, operasional bank yang terdaftar tetap berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Ummah, 2019).

Lebih jauh lagi, peran vital sektor perbankan juga mencakup pengelolaan pendanaan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Salah satu sektor terpenting yang memiliki peran dalam kehidupan masyarakat adalah sektor perbankan, yang harus melakukan pengaturan pendanaan yang baik untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan menjual saham di pasar modal, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan perusahaan. (Dewi & Abundanti, 2019).

Perkembangan industri perbankan telah mengalami perubahan signifikan di seluruh dunia, tidak hanya dalam struktur industri, tetapi juga dalam model bisnis, persaingan, serta penciptaan instrumen keuangan dan aset baru. Meskipun fungsi utama bank tetap sama, cara menjalankannya terus berkembang menyesuaikan dengan kondisi pasar dan regulasi di masing-masing negara. Setiap bank mengembangkan strategi manajemen risiko yang berbeda guna menciptakan nilai bagi pemegang saham serta memastikan tingkat risiko yang optimal dalam operasionalnya. Seiring dengan inovasi teknologi, industri perbankan mengalami transformasi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan model bisnis baru serta cara baru dalam berinteraksi dengan nasabah. Perbankan terbuka, misalnya, memungkinkan akses yang lebih luas terhadap data pelanggan, mengurangi hambatan masuk bagi perusahaan teknologi finansial, dan menantang dominasi tradisional bank dalam akses eksklusif terhadap data nasabah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan keuangan, tetapi juga memperluas aksesibilitas bagi pelanggan, mengubah lanskap perbankan secara keseluruhan. (Adolph, 2023).

Stabilitas perbankan berperan penting dalam sistem keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank umum di Indonesia, terutama yang besar seperti Bank Mandiri, BNI, BCA, dan BRI, memainkan peran strategis dalam mendukung sektor riil dan ketahanan finansial. Selain membiayai UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, bank-bank ini juga berkontribusi pada proyek infrastruktur dan investasi berkelanjutan, yang pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional (Bursa Efek Indonesia, 2023).



Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Perbankan di BEI Periode 2019-2023

Sumber: (Bursa Efek Indonesia, 2024)

Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada 2019 tercatat sebanyak 45 bank, kemudian meningkat menjadi 46 pada periode 2020 hingga 2022, dan bertambah lagi menjadi 47 pada tahun 2023. Tren ini tidak hanya mencerminkan pertambahan jumlah entitas, tetapi juga mencerminkan berkembangnya karakteristik sektor perbankan secara keseluruhan, seperti peningkatan skala usaha, keragaman produk dan layanan, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor perbankan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, industri perbankan menghadapi tantangan risiko yang semakin kompleks karena aktivitas utama mereka mencakup penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, dan investasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan menjadi sangat penting, baik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan maupun untuk menarik kepercayaan investor yang cenderung memilih perusahaan dengan manajemen risiko yang kuat sebagai upaya meminimalkan potensi kerugian (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2020).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Risiko selalu berkaitan dengan ketidakpastian dan menjadi salah satu tantangan utama dalam dunia bisnis. Pada masa lalu, risiko sering dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, tetapi kini dipahami bahwa risiko dapat berdampak positif maupun negatif terhadap hasil bisnis. Oleh karena itu, stakeholder memerlukan informasi yang transparan terkait pengungkapan risiko untuk mendukung pengambilan keputusan investasi dan bisnis. Kompleksitas strategi bisnis dan peraturan yang terus berkembang semakin menyulitkan investor dalam memahami informasi keuangan tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai risiko. Dalam menghadapi hal ini, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko sebagai upaya mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara berkala. Akibatnya, pengungkapan risiko menjadi aspek penting untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan mampu menghadapi ketidakpastian (Kristanti, 2023).

Minimnya informasi mengenai kondisi bisnis di masa depan dapat meningkatkan ketidakpastian dan risiko bagi perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, penerapan manajemen risiko menjadi langkah krusial dalam menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas operasional. Dalam industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan sertifikasi manajemen risiko bagi sumber daya manusia di sektor perbankan guna meningkatkan kompetensi dan kepatuhan terhadap standar industri. Penguatan kapasitas SDM ini menjadi faktor utama dalam menjamin penerapan manajemen risiko yang efektif serta meningkatkan transparansi perusahaan melalui pengungkapan risiko yang lebih akurat (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). *Risk management disclosure* menjadi salah satu elemen utama dalam pengungkapan risiko, karena memberikan investor serta pihak berkepentingan akses terhadap informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Transparansi dalam laporan keuangan tidak hanya membantu stakeholder dalam menilai kondisi perusahaan tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan, sehingga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dapat terjaga (Kristanti, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tantangan pengungkapan manajemen risiko di sektor perbankan, terutama dalam menghadapi risiko yang kompleks, seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasi. Pengungkapan manajemen risiko tidak hanya mencerminkan transparansi perusahaan, tetapi juga menjadi bukti akuntabilitas bank kepada investor dan regulator. Informasi mengenai bagaimana bank mengidentifikasi dan mengelola risiko memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dalam menghadapi ketidakpastian. Selain itu, bagi investor, pengungkapan risiko menjadi alat penting dalam menilai tingkat risiko investasi. Namun, meskipun regulasi

mengenai manajemen risiko telah diterapkan, praktik pengungkapan masih menunjukkan variasi antarbank, baik dalam tingkat kepatuhan maupun kualitas keterbukaan informasi. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki berbagai variabel yang berkontribusi pada pengungkapan manajemen risiko oleh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam konteks tata kelola perusahaan, mekanisme pengawasan terdiri dari berbagai macam struktur kepemilikan, termasuk manajemen, lembaga, dan perusahaan di seluruh dunia, serta kepemilikan publik dan ukuran perusahaan. Mekanisme ini berperan dalam mengoptimalkan pengendalian perusahaan serta mengurangi konflik kepentingan yang dapat timbul akibat masalah keagenan antara manajemen dan pemilik (Nasution et al., 2020). Transparansi dalam tata kelola menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap manajemen perusahaan, sehingga tingkat keterbukaan informasi dapat mencerminkan kualitas tata kelola suatu entitas (Nasution et al., 2020). Dalam hal ini, pengungkapan manajemen risiko sangat penting karena mencakup semua risiko yang telah dikelola oleh perusahaan, tetapi juga menjelaskan strategi perusahaan dalam menghadapi risiko di masa depan (Lokaputra et al., 2022).

Berikut ini adalah perusahaan perbankan yang mengungkapkan manajemen risiko pada periode 2019-2023 pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Risk management Disclosure Perusahaan Perbankan Periode 2019-2023

Sumber idx.co.id (data telah diolah penulis 2024)

Tren pengungkapan manajemen risiko di sektor perbankan menunjukkan peningkatan selama periode 2019-2023. Data pada Gambar 1.2 mengilustrasikan bahwa pada tahun 2023,

rata-rata perusahaan perbankan yang mengungkapkan manajemen risiko mencapai 35%, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, kenaikan ini hanya sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan terjadi secara bertahap.

Meskipun persentase pengungkapan manajemen risiko perusahaan perbankan tergolong tinggi, hal ini tidak menjamin bahwa semua aspek risiko telah diungkapkan sepenuhnya. Masih terdapat residu nilai dalam pengungkapan risiko, yang menunjukkan adanya aspek tertentu yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh perusahaan perbankan. Ketidaktepatan ini menggarisbawahi perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap praktik manajemen risiko yang diterapkan, untuk memastikan bahwa bank dapat lebih transparan dan efektif dalam mengelola risiko yang ada.

Dalam konteks ini, teori keagenan memberikan pemahaman tentang hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer), di mana perbedaan kepentingan di antara keduanya dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada transparansi pengungkapan. Teori ini mengemukakan bahwa tujuan agen dan prinsipal tidak selalu sejalan, terutama dalam memaksimalkan pengembalian investasi dan pembayaran (Jensen & Meckling, 2019). Dalam hal ini, pengungkapan manajemen risiko menjadi penting, karena dapat mengurangi perbedaan informasi antara pemegang saham dan manajemen. Pengungkapan yang berguna, termasuk melalui pengungkapan manajemen risiko, berfungsi untuk menjembatani perbedaan informasi, sehingga manajer dapat berbagi data yang relevan dan transparan kepada pemilik atau pemegang saham. Dengan demikian, pengungkapan yang lebih komprehensif dan efektif sangat penting untuk mengatasi ketidakseimbangan informasi dan memastikan manajemen risiko yang lebih baik dalam perusahaan perbankan (Lubis, 2024).

Penelitian ini merujuk dari dua peristiwa lampau terkait praktik pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan perbankan yaitu :

Kasus pertama yaitu volatilitas suku bunga di PT Bank Negara Indonesia Tbk. Pada September 2023, BNI menghadapi tantangan berupa kenaikan biaya pendanaan yang mempengaruhi suku bunga kredit, hal ini dipicu oleh penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia sebagai langkah mengendalikan inflasi. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan *Net Interest Margin* (NIM) BNI menjadi 4,64%, lebih rendah dibandingkan 4,8% pada periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan tekanan pada margin keuntungan akibat volatilitas suku bunga. Keadaan ini terjadi karena keadaan global yang mengalami pergeseran yang signifikan. Ini terutama disebabkan oleh peningkatan risiko geopolitik, imbal hasil obligasi AS yang tinggi, dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Dampaknya terhadap ekonomi

domestik salah satunya terlihat dari volatilitas nilai tukar rupiah tahun berjalan. Dari sisi nilai tukar, volatilitas Rupiah diharapkan lebih rendah di semester kedua 2024 di tengah tren potongan FFR serta penurunan dollar indeks. Aliran dana asing diharapkan akan lebih tinggi di semester kedua 2024 guna dapat menutupi sebagian defisit neraca transaksi berjalan yang diproyeksikan mencapai 0,5% sampai 1,0% dari PDB di 2024. Dalam hal ini, BNI telah mengambil tindakan strategis untuk memastikan kinerja tetap stabil, dengan program transformasi yang dijalankan secara disiplin dan strategi pertumbuhan yang dipilih secara cermat dan terukur. Perseroan telah berhasil menjalankan fungsi intermediasi dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang optimal bagi para *shareholder*. Langkah-langkah strategis yang dimaksud antara lain: bagaimana BNI menangani laporan tahunan Pilar III, apakah proses identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi cukup, yaitu: Melakukan uji stres terintegrasi volatilitas nilai tukar dan suku bunga pada Konglomerasi Keuangan BNI, serta mengembangkan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi berbasis teknologi, BNI secara konsisten (PT Bank Negara Indonesia Tbk., 2023)

Kasus kedua yaitu Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menghadapi tantangan besar dalam manajemen risiko kredit pada tahun 2020, khususnya terkait dengan kredit macet yang meningkat akibat dampak dari pandemi COVID-19. Bank Mandiri mencatat hampir 3 juta debitur dengan outstanding kredit mencapai Rp 193 triliun. Jumlah debitur dan outstanding kredit mengalami penurunan yang konsisten sejak Oktober 2020, dengan jumlah debitur turun menjadi 2,7 juta dan outstanding kredit menjadi Rp189,3 triliun pada Februari 2021. Berdasarkan laporan tahunan Bank Mandiri 2020, sejumlah indikator menunjukkan kinerja yang baik meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi. Meskipun likuiditas dan rasio kecukupan modal berada dalam posisi yang aman, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) mengalami kenaikan. *NPL gross* meningkat sebesar 49 bps YoY menjadi 3,14% pada akhir 2020, mencerminkan meningkatnya kredit macet akibat dampak pandemi. Pada tahun 2021, angka ini sedikit menurun menjadi 3,06%. Bank Mandiri menyesuaikan kebijakan kredit dengan memfokuskan penyaluran pada sektor-sektor yang lebih cepat pulih setelah pandemi. Dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap sektor perbankan termasuk Bank Mandiri, yang harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu dan meningkatkan upaya manajemen risiko untuk menjaga kesehatan portofolio kreditnya (PT Bank Mandiri, 2020).

Dua peristiwa tersebut menggambarkan bahwa sektor perbankan menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan suku bunga dan

peningkatan kredit macet. Untuk mengatasi tantangan ini, BNI memilih untuk mengadopsi teknologi dalam mengelola volatilitas pasar, sedangkan Bank Mandiri menyesuaikan kebijakan kreditnya agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi. Perbedaan strategi ini menegaskan pentingnya pengungkapan manajemen risiko dalam meningkatkan transparansi, memperkuat stabilitas keuangan, serta membangun kepercayaan investor dan pemangku kepentingan.

Urgensi keterbukaan informasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi mendorong pentingnya penelitian mengenai pengungkapan manajemen risiko. Pengungkapan manajemen risiko yang efektif memungkinkan bank untuk lebih siap untuk menangani tantangan keuangan dan meningkatkan kredibilitas mereka di mata investor dan regulator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki variabel yang memengaruhi pengungkapan manajemen risiko, dengan penekanan khusus pada bagaimana industri perbankan Indonesia berfungsi. menerapkan transparansi risiko guna memastikan keberlanjutan dan stabilitas pasar keuangan. Sektor perbankan Indonesia, yang memiliki tingkat risiko tinggi dan rentan terhadap kecurangan, membutuhkan solusi untuk memperbaiki manajemen risiko. Sejarah kasus-kasus terkait permasalahan regulasi yang lemah menjadi alasan pentingnya pengungkapan manajemen risiko yang berbasis pada kerangka kerja COSO (*Enterprise Risk Management/ERM*), yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan lainnya, dengan 33 indikator pengungkapan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan ini, seperti kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan komite manajemen risiko, serta variabel kontrol seperti *leverage* dan ukuran perusahaan, menjadi kunci dalam menentukan tingkat transparansi risiko yang diterapkan di sektor perbankan Indonesia. Pelaporan keuangan sering kali dianggap sebagai penyebab utama masalah keuangan yang terjadi, terutama terkait dengan kurangnya transparansi, khususnya dalam pengungkapan informasi manajemen risiko. Skandal yang melibatkan beberapa perusahaan besar pada akhir 1990-an dan awal 2000-an diakibatkan oleh ketidakjelasan dalam laporan keuangan mereka, yang mendorong pengenalan berbagai regulasi terkait pengungkapan informasi. Salah satu regulasi penting adalah *International Accounting Standards Board* (IASB, 2008), yang melalui *International Accounting Standard* (IAS) No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan IAS 32 mengenai Instrumen Keuangan: Penyajian, mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai ketidakpastian utama dan risiko spesifik yang mereka hadapi. Di sisi lain, *Financial Accounting Standards Board* (FASB, 1998) dengan SFAC No. 133 mengatur pengungkapan risiko pasar akibat penggunaan aset keuangan. Selain itu, terdapat pedoman manajemen risiko seperti COSO *Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework* yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola risiko dengan lebih sistematis dan transparan. Di Indonesia,

pengungkapan risiko dalam perbankan diatur melalui Surat Edaran No.13/24/DPNP yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan perbankan untuk melakukan penilaian mandiri menggunakan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR). penilaian ini mencakup aspek penting seperti profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), profitabilitas, dan permodalan (Bi.go.id, 2020).

Regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko di industri perbankan, seperti PBI No.5/8/PBI/2003 dan pembaruannya, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengungkapan risiko dan mengurangi potensi masalah keuangan di masa depan. Tindakan manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk mencegah masalah seperti penarikan dana pihak ketiga yang dapat mengganggu likuiditas dan bahkan menyebabkan kebangkrutan. Oleh karena itu, pengungkapan manajemen risiko dalam laporan keuangan menjadi krusial untuk memastikan keputusan yang tepat bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan yang transparan membantu menjaga keseimbangan antara stakeholders dan shareholders, mendukung tujuan perusahaan (Syafaat & Putra, 2020).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengungkapan mengandung makna bahwa keterbukaan merupakan dasar kepercayaan masyarakat terhadap manajemen terhadap system perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, keutamaan mekanisme pengendalian perusahaan harus diamati dari tingkat keterbukaan atau transparansinya (Nasution et al., 2020). Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan hubungan signifikan terhadap kepemilikan institusional. Di definisikan bahwa kepemilikan institusional adalah sejumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga investasi lainnya disebut kepemilikan institusional. Investor institusi dimotivasi untuk mengumpulkan informasi tentang perusahaan tempat mereka berinvestasi, yang dapat mempengaruhi praktik pengungkapan perusahaan, termasuk pengungkapan risiko, yang menjadikan kepemilikan institusional penting (Alshirah & Alshira'h, 2023). Penelitian menurut mengenai (Kristanti et al., 2024), *Exploring the level of realm disclosure for Indonesian insurance business using ISO 31000*, dengan hasil yang menemukan adanya pengaruh kepemilikan institusional secara positif signifikan pada pengungkapan manajemen resiko. Mengacu pada (Utami, 2022), perihal pengaruh ukuran dewan komisaris independen, komite audit, dan struktur kepemilikan institusional pada pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan telekomunikasi yang termasuk di dalam daftar BEI, mempunyai pengaruh secara positif signifikan pada pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan penelitian menurut (Alshirah & Alshira'h, 2023), mengenai *The impact of corporate ownership structure on corporate risk disclosure: evidence from an emerging*

economy, dengan hasil tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional secara signifikan pada pengungkapan risiko, yang mungkin menunjukkan bahwa manajer merasa tidak diharuskan mengungkapkan informasi lebih banyak kepada pemilik institusional.

Penelitian Pengungkapan manajemen risiko ini telah diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan (Khasnawati, 2022), mengenai Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Umur perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko, dengan hasil adanya pengaruh kepemilikan publik secara positif signifikan pada pengungkapan manajemen risiko. Porsi saham kepemilikan publik yang semakin banyak menyebabkan tekanan yang didapatkan juga semakin besar pada perusahaan untuk memberi lebih banyak informasi yang tertuang pada laporan tahunannya, termasuk pengungkapan manajemen risiko. Dan menurut (Atmadji, 2019), mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Risk management Disclosure*, dengan hasil memunculkan adanya pengaruh secara positif kepemilikan saham pada pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan pada kajian (Ahmed, 2023), mengenai *The relationship between corporate governance mechanisms and integrated reporting practices and their impact on sustainable development goals: evidence from South Africa*, dengan hasil tidak adanya pengaruh kepemilikan publik pada pengungkapan manajemen risiko.

Berbeda dengan komite manajemen risiko didefinisikan sebagai struktur organisasi yang dibuat oleh perusahaan untuk berfokus pada pengelolaan risiko, RMC bertanggung jawab untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan manajemen risiko perusahaan (Ayuningtyas et al., 2022). Penelitian menurut (Ayuningtyas et al., 2022), mengenai *Risk management Committee and Textual Risk Disclosure*, dengan adanya pengaruh secara positif pada pengungkapan risiko perusahaan. Dan menurut (Lokaputra et al., 2022), mengenai Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko, dengan hasil positif signifikan pada pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan penelitian menurut (Lubis, 2024), mengenai Pengaruh Gender Keberagaman Dewan Komisaris, Risiko Komite Manajemen, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan, dengan hasil bahwa Risiko Komite Manajemen tidak memberi pengaruh pada pengungkapan manajemen risiko, yang mengindikasikan jika RMC tidak dijadikan sebagai sebuah badan yang bersifat independen pada perusahaan, namun termasuk badan yang sudah terintegrasi pada jajaran berbagai bagian di dalam perusahaan itu sendiri sehingga perusahaan tidak membentuk RMC ini untuk mempunyai kewenangan independen selain daripada sektor yang mana pihak pengelola risiko bekerja.

Sedangkan *leverage* yang merujuk pada penggunaan dana pinjaman oleh perusahaan sebagai sumber pembiayaan investasi. Setiap investasi yang dilakukan mengandung risiko tertentu, termasuk kemungkinan kerugian yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utangnya. Oleh karena itu, sebelum memberikan pinjaman, kreditor akan mengevaluasi tingkat risiko investasi pada perusahaan. Bertambah tingginya utang di dalam perusahaan, maka resiko yang perlu ditanggung juga akan semakin tinggi. Hal tersebut mendorong pihak perusahaan untuk bisa lebih transparan lagi dalam mengungkapkan manajemen risiko guna memberikan kepastian informasi kepada pemangku kepentingan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara *leverage* dan pengungkapan manajemen risiko. (Keasaman et al., 2021), mengenai Pengaruh Tingkat *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Publik Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko, dengan hasil menunjukkan bahwa secara simultan *leverage* mempunyai pengaruh secara positif pada pengungkapan manajemen risiko. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi utang pada perusahaan, semakin besar pula kewajibannya untuk mengungkapkan risiko yang ditanggungnya. Ketergantungan perusahaan terhadap kreditor juga memperkuat insentif manajemen untuk menyebarluaskan informasi perusahaan ke publik demi meningkatkan transparansi dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Sedangkan penelitian menurut (Salmita, 2023), mengenai Analisis *Risk management Disclosure: Leverage*, Profitabilitas dan Kepemilikan Publik (Studi pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia), dengan hasil menunjukkan secara parsial *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *risk management disclosure*.

Dan penelitian menurut (Taswan, 2020), mengenai Pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, *leverage* dan Profitabilitas terhadap *risk management Disclosure*, dengan hasil menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *risk management disclosure*. menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *risk management disclosure*. Ketidakhadiran pengaruh ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan karakteristik perusahaan, kebijakan internal dalam pengelolaan risiko, atau tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi mungkin telah memiliki sistem manajemen risiko yang solid, sehingga tidak merasa perlu untuk lebih terbuka dalam pengungkapannya. Faktor lain yang dapat memengaruhi hasil ini adalah persepsi investor dan kreditor terhadap informasi yang diungkapkan, di mana beberapa perusahaan lebih berfokus pada aspek lain, seperti profitabilitas dan likuiditas, dalam menentukan tingkat transparansi manajemen risiko mereka.

Kemudian ukuran perusahaan adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan berdasarkan aspek keuangan dan operasionalnya. Penilaian ukuran perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa parameter, seperti total aset, pendapatan tahunan, jumlah tenaga kerja, serta nilai kapitalisasi pasar. Perusahaan dengan total aktiva yang besar umumnya memiliki skala usaha yang lebih luas, peluang keuntungan yang lebih tinggi, namun juga tingkat risiko yang lebih besar dalam kegiatan bisnisnya. Penelitian menurut (Wahyuni et al., 2020), mengenai Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan (Studi pada Perusahaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh secara positif signifikan pada pengungkapan manajemen risiko dikarenakan dengan skala yang lebih besar mempunyai sumber daya yang lebih, sistem operasional yang lebih kompleks, serta kewajiban yang lebih tinggi dalam hal transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan besar juga lebih rentan terhadap berbagai risiko bisnis, sehingga mereka cenderung lebih aktif dalam menerapkan strategi pengelolaan risiko yang efektif serta mengungkapkannya kepada pemangku kepentingan. Selain itu, tekanan dari investor, regulator, dan masyarakat mendorong perusahaan besar untuk menyajikan informasi risiko secara lebih terbuka guna meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Penelitian menurut (Rujjin & Sukirman, 2020), mengenai *The Effect of Firm Size, Leverage, Profitability, Ownership Structure, and Firm Age on Enterprise Risk management Disclosures*, menunjukkan adanya pengaruh ukuran perusahaan secara positif signifikan pada pengungkapan manajemen risiko. Dan kajian menurut (Ibrahim, 2022), mengenai Pengaruh Dewan Komisaris, *Leverage*, Kepemilikan Publik, dan *Firm size* Terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Dengan ukuran perusahaan, yang tidak selalu menjadi indikator tingkat keterbukaan dalam pengungkapan risiko, karena perusahaan besar bisa saja memiliki sistem manajemen risiko yang sudah kuat sehingga tidak merasa perlu mengungkapkan informasi tambahan. Selain itu, kepemilikan publik tidak selalu memberikan dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi, terutama jika tidak ada tekanan yang cukup dari para pemegang saham publik terkait kebijakan pengungkapan risiko.

Berdasarkan latar belakang dengan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, dan Komite Manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Manajemen

Risiko dengan *Leverage*, dan Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2019-2023)”.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Kepemilikan institusional, Kepemilikan publik, Komite manajemen Risiko, Pengungkapan Manajemen Risiko dan *leverage* dan ukuran perusahaan pada perusahaan Perbankan periode 2019-2023?
- 2) Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan institusional, Kepemilikan publik dan Komite manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan variabel control *leverage* dan ukuran perusahaan secara simultan pada perusahaan Perbankan periode 2019-2023?
- 3) Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan Perbankan periode 2019-2023?
 - a. Kepemilikan institusional terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan variabel control *leverage* dan ukuran perusahaan pada perusahaan Perbankan periode 2019-2023?
 - b. Kepemilikan publik terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan variabel control *leverage* dan ukuran perusahaan pada perusahaan Perbankan periode 2019-2023?
 - c. Komite manajemen risiko terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan variabel control *leverage* dan ukuran perusahaan pada perusahaan Perbankan periode 2019-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan institusional, Kepemilikan publik dan Komite manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko dengan variabel control *leverage* dan ukuran perusahaan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2019-2023)?
- 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara Kepemilikan institusional, Kepemilikan publik dan Komite manajemen Risiko terhadap Pengungkapan

Manajemen Risiko dengan variabel control *leverage* dan ukuran perusahaan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2023)?

- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan Perbankan periode 2019-2023
 - a. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kepemilikan Institusional dengan pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2023?
 - b. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara Kepemilikan publik dengan pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2023?
 - c. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara Komite manajemen risiko dengan pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2023?
- 4) Mengidentifikasi pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap pengungkapan manajemen risiko.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemilikan institusional, Kepemilikan publik dan Komite manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2019-2023) dapat menjadi manfaat bagi banyak pihak berkepentingan secara langsung. Manfaat dari kajian ini bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu aspek praktis dan aspek teoritis.

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur mengenai pengungkapan manajemen risiko di sektor perbankan. Studi ini menggali hubungan antara faktor-faktor seperti kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan komite manajemen risiko terhadap transparansi pengungkapan. Dengan demikian, penelitian ini membantu memperluas pemahaman terkait implementasi teori keagenan dan teori stakeholder dalam konteks pengelolaan risiko di industri perbankan. Selain itu, temuan pada kajian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kerangka teoritis baru yang relevan dengan pengungkapan risiko di negara berkembang. Sebagai bagian dari kontribusi penelitian ini, terdapat manfaat yang diharapkan untuk berbagai pihak, termasuk bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan, kajian ini bisa menambah dan memperkaya pengetahuan tambahan mengenai pengaruh Kepemilikan institusional, Kepemilikan publik dan Komite manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2019-2023.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan, kajian ini bisa memberi pemahaman tambahan bagi peneliti selanjutnya terkait berbagai faktor yang memberi pengaruh pada Pengungkapan Manajemen Risiko terutama Kepemilikan institusional, Kepemilikan publik dan Komite manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.5.2 Aspek Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan, seperti manajemen bank, investor, dan regulator, dalam memahami banyak faktor yang memengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Informasi ini dapat digunakan oleh manajemen bank untuk meningkatkan transparansi serta memperbaiki strategi komunikasi risiko kepada publik. Selain itu, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk menyempurnakan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan serta pengungkapan risiko di sektor perbankan. Investor juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam menilai risiko investasi pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memberi kontribusi praktis yang signifikan. Temuan kajian ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sektor perbankan, termasuk perusahaan dan para pemegang saham, seperti dijelaskan berikut ini:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait Kepemilikan institusional, Kepemilikan publik dan Komite manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko sebagai sumber informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan praktik pengelolaan risiko mereka. memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang risiko yang dihadapi perusahaan, yang membantu manajemen membuat keputusan strategis. Meningkatkan keberlanjutan operasional perusahaan melalui peningkatan tata kelola dan praktik manajemen risiko.

2. Bagi Shareholder

Untuk mendapatkan Informasi yang lebih transparan tentang risiko yang dihadapi perusahaan membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan asuransi karena pengungkapan yang baik dapat memberikan gambaran yang jelas tentang upaya manajemen risiko yang dilakukan perusahaan.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada sistematika penulisan tugas akhir berisikan mengenai sistematika dan penguraian secara singkat terkait dengan laporan penelitian yang mencakup Bab I hingga Bab V. Sistematika penulisan secara garis besar yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab 1 memberikan gambaran umum tentang objek penelitian, latar belakang penelitian, dan tujuan penelitian. Ini juga mengangkat kasus yang menjadi isu penting untuk diteliti, menggunakan argumen teoritis yang ada. Dibahas juga tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktisnya. Terakhir, akan dibahas struktur penulisan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab 2 kita akan menemukan dasar teori dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan penelitian kita juga akan membuat kerangka pemikiran yang menggambarkan masalah penelitian dengan berbagai cara; dan kita akan membahas ruang lingkup penelitian, yang menjelaskan dengan rinci batas dan cakupan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab 3 memberikan penjelasan tentang jenis penelitian dan metodologi yang digunakan, serta tahapan dan jenis data yang digunakan, termasuk populasi dan sampel, serta metode untuk menganalisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 menguraikan penjelasan mengenai hasil analisis terhadap data dan pemaparan hasil analisis deskriptif, serta membahas hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 5 menguraikan kesimpulan atas hasil dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan dan ditujukan kepada investor dan perusahaan.